

Pengembangan Pedoman Laporan Keuangan dan Optimalisasi Transaksi Digital untuk Peningkatan Akuntabilitas BUMDes Desa Pagerwangi

Nada Aziza Anindya*, Asma Nur'izzah, Junie Dwi Sukma,

Aristanti Widyaningsih, Rika Nurrizkiana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia

*Penulis korespondensi: nadaazizaa10@gmail.com

Dikirim : 4 Juni 2026

Direvisi : 22 Agustus 2026

Diterima : 23 Agustus 2026

Abstrak: Permasalahan tata kelola keuangan menjadi tantangan utama yang dihadapi BUMDes Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut ditandai dengan belum tersedianya pedoman pelaporan keuangan yang terstandar, pengelolaan transaksi yang masih bergantung pada metode manual, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pembayaran digital QRIS karena rekening usaha masih bercampur dengan rekening pribadi pengurus. Program pendampingan ini bertujuan untuk menyusun pedoman pelaporan keuangan yang terstruktur serta mendorong optimalisasi transaksi non-tunai pada Unit Toko Desa guna memperkuat akuntabilitas keuangan BUMDes. Pelaksanaan program menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode pendampingan partisipatif dengan analisis akar masalah (root cause analysis) selama lima kali kunjungan lapangan pada April hingga Mei 2026. Program ini menghasilkan pedoman laporan keuangan yang mencakup chart of accounts, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, serta reaktivasi QRIS bisnis yang telah dipisahkan dari rekening pribadi. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan BUMDes melalui peningkatan struktur pelaporan keuangan dan optimalisasi transaksi digital yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: akuntabilitas, BUMDes, digitalisasi transaksi, laporan keuangan, pendampingan masyarakat, QRIS

Abstract: Financial governance issues have become a major challenge faced by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) of Pagerwangi Village, Lembang District, West Bandung Regency. This condition is characterized by the absence of standardized financial reporting guidelines, transaction management that still relies on manual methods, and the suboptimal utilization of the QRIS digital payment system due to the mixing of business accounts with the personal accounts of management. This community assistance program aims to develop a structured financial reporting guideline and promote the optimization of cashless transactions in the Village Shop Unit to strengthen the financial accountability of the BUMDes. The program was implemented using a descriptive qualitative approach through participatory assistance methods with root cause analysis over five field visits from April to May 2026. The program produced a financial reporting guideline consisting of a chart of accounts, income statement, statement of financial position, and cash flow statement, as well as the reactivation

of a business QRIS account separated from personal accounts. Overall, this program contributes to strengthening BUMDes financial governance by improving the structure of financial reporting and optimizing digital transactions that are more transparent and accountable.

Keywords: *accountability, BUMDes, community assistance, financial reporting, QRIS, transaction digitalization*

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Pemerintah desa diharapkan mampu untuk mengelola potensi lokal secara produktif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui BUMDes. Keberadaan BUMDes ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap BUMDes. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan terstandar menjadi alat utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga lembaga pengawas. Potensi penyimpangan dan ketidaktransparanan pengelolaan aset desa akan sulit dideteksi dan dicegah secara dini apabila tidak adanya sistem pelaporan keuangan yang memadai (Fitrilia & Rini, 2025).

BUMDes Berkah Mandiri Wangi yang berlokasi di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, memiliki tiga unit usaha aktif, yaitu toko desa, penyewaan lapangan futsal, dan peternakan sapi potong. Potensi ekonomi yang dimiliki tersebut belum diimbangi dengan tata kelola keuangan yang terstruktur dan akuntabel pada tingkat konsolidasi internal, sehingga pelaporan keuangan antarunit usaha belum berjalan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama Bendahara, Kepala Desa, dan Direktur BUMDes dalam rangkaian dua kali kunjungan lapangan awal, ada beberapa permasalahan mendasar yang ditemukan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya pada aspek operasional Unit Toko Desa sebagai unit usaha utama serta tata kelola organisasi secara umum.

Pertama, belum tersedia pedoman pengelolaan keuangan konsolidasi yang mencakup

standar penyusutan aset tetap, alur pelaporan, jadwal pelaporan, dan mekanisme evaluasi. Kedua, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sarana digital dan tidak berfungsinya perangkat komputer operasional, sehingga proses rekapitulasi dan konsolidasi laporan keuangan menjadi kurang optimal. Ketiga, sistem pembayaran digital QRIS belum dimanfaatkan secara optimal karena sebelumnya masih terhubung dengan rekening pribadi pengurus, sehingga penggunaannya dihentikan untuk menghindari pencampuran dana usaha dan dana pribadi.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa salah satu faktor kritis yang menentukan keberhasilan BUMDes adalah kualitas pengelolaan keuangan. Pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib dan terstandar penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung akses BUMDes terhadap pembiayaan eksternal (Hadi & Kurniawansyah, 2025; Slamet dkk., 2025). Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat serta kinerja unit usaha. Temuan Putra dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun BUMDes telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelola masih menghadapi kendala dalam memahami perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai sehingga diperlukan dukungan pendampingan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pendekatan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan formal di bidang akuntansi.

Bertolak dari kompleksitas permasalahan tersebut, tim pendamping dari Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia berinisiatif melaksanakan program pendampingan yang difokuskan pada penguatan pedoman format laporan keuangan yang didukung oleh optimalisasi sistem transaksi digital QRIS sebagai instrumen pendukung pada Unit Toko Desa dalam rangka penguatan tata kelola keuangan BUMDes secara menyeluruh. Melalui program pendampingan ini, diharapkan BUMDes Berkah Mandiri Wangi mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi yang terstandar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, serta mengoperasikan sistem QRIS bisnis secara optimal sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa secara berkelanjutan.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pendampingan partisipatif (*participatory engagement*) sebagai strategi utama untuk mencapai kondisi organisasi yang diharapkan. Pendekatan ini dipilih agar tim pendamping dapat terjun langsung ke lapangan guna memahami kondisi faktual, mengidentifikasi akar permasalahan, serta merancang solusi secara kolaboratif bersama mitra. Proses identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode *Root Cause Analysis* (RCA) melalui pemetaan sebab-akibat (*cause mapping*). Dalam konteks pengabdian dan tata kelola desa, RCA telah banyak diterapkan untuk mengevaluasi berbagai permasalahan organisasi dan layanan, baik dalam kegiatan pengabdian masyarakat (Ardan dkk., 2023), hambatan sistem digital (Adristi dkk., 2025), maupun kelemahan akuntabilitas laporan keuangan secara terpisah (Nugroho, 2018). Artikel ini mengisi kesenjangan (*gap*) tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan RCA untuk mendiagnosis dua dimensi sekaligus secara simultan, yaitu kelemahan manajemen keuangan konsolidasi dan hambatan efektivitas teknologi transaksi digital (QRIS) pada ekosistem BUMDes. Metode RCA ini diterapkan untuk menyediakan kerangka analisis yang logis dalam mengidentifikasi masalah operasional dan manajerial dari tingkat dasar (Sakdiyah dkk., 2022), sehingga program intervensi yang dirancang dapat berjalan secara tepat sasaran.

Hubungan kemitraan (*partnership*) yang sinergis dalam kegiatan ini melibatkan tim pendamping yang terdiri dari tiga orang mahasiswa dan dua orang dosen pendamping dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sementara dari pihak mitra, keterlibatan aktif diikuti oleh Kepala Desa, Direktur BUMDes selaku penanggung jawab operasional, serta Bendahara BUMDes selaku pelaksana teknis keuangan. Lama proses kegiatan pengabdian ini berlangsung selama dua bulan, yaitu selama periode April hingga Mei 2026. Fokus pendampingan dilakukan secara menyeluruh pada tingkat organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Mandiri Wangi serta secara spesifik pada Unit Toko Desa yang berlokasi di Jalan Sukanagara No. 23, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap pertama dimulai dengan observasi langsung ke lokasi serta melakukan diskusi dan wawancara mendalam bersama Kepala Desa, Direktur BUMDes, Bendahara, dan pengurus aktif. Pada tahap awal ini, tim juga melakukan evaluasi terhadap program pendampingan yang pernah dilakukan sebelumnya untuk melihat aspek yang masih

perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil diskusi dan penerapan *Root Cause Analysis* tersebut, tim bersama pengurus mengidentifikasi kebutuhan utama BUMDes, khususnya terkait penyusunan format laporan keuangan konsolidasi organisasi yang lebih terstruktur serta optimalisasi penggunaan sistem pembayaran digital untuk mendukung transaksi usaha toko.

Sebagai langkah eksekusi program, tim pendamping merealisasikan satu fokus utama berupa penyusunan format draf laporan keuangan manual BUMDes yang meliputi daftar akun (*Chart of Accounts*), laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas sebagai instrumen rujukan pengelolaan keuangan. Upaya ini didukung oleh reaktivasi dan optimalisasi sistem pembayaran digital menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bisnis pada Unit Toko Desa sebagai instrumen pendukung transaksi non-tunai yang lebih transparan dan terkontrol.

Seluruh data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dan observasi lapangan terhadap operasional harian Toko Desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMDes, meliputi Kepala Desa, Direktur BUMDes, dan Bendahara BUMDes, sedangkan sosialisasi program secara khusus diarahkan kepada Direktur dan Bendahara sebagai pengelola operasional utama. Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui lima kunjungan lapangan selama periode program berlangsung.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini, tim menggunakan alat ukur kualitatif deskriptif berupa lembar observasi partisipatif harian, ketersediaan dokumen draf pelaporan keuangan baru, dan dasbor riwayat transaksi pada aplikasi QRIS bisnis. Indikator keberhasilan program ini dinilai dari tiga dimensi dampak, yaitu perubahan sikap pengelola dalam berkomitmen memisahkan keuangan pribadi dan usaha, perubahan sosial budaya organisasi berupa beralihnya kebiasaan mencatat kas sederhana menjadi pelaporan yang tertib akuntansi, serta perubahan ekonomi masyarakat sasaran yang dibuktikan dengan terekamnya aktivitas transaksi riil konsumen menggunakan QRIS bisnis di Toko Desa selama masa pendampingan.

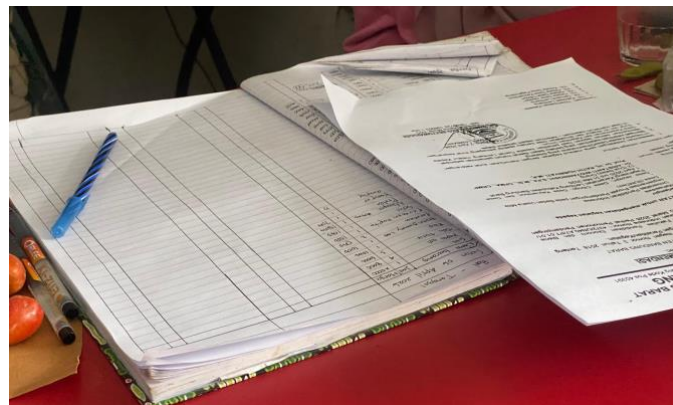
3. Hasil dan Diskusi

3.1 Identifikasi Permasalahan Mitra

Kegiatan pendampingan ini difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan BUMDes Berkah Mandiri Wangi melalui standarisasi instrumen pelaporan keuangan dan optimalisasi sistem transaksi digital pada Unit Toko Desa sebagai unit usaha utama. Tim pendamping melakukan observasi dan identifikasi alur administrasi dari segi operasional usaha pada tahap awal kegiatan yang mengutamakan Unit Toko Desa sebagai aktivitas ekonomi utama BUMDes.

Hasil observasi menunjukkan bahwa permasalahan pada Unit Toko Desa yang paling sering dirasakan adalah jumlah konsumen yang tidak stabil sehingga berdampak pada fluktuasi pendapatan. Namun, setelah mendalami data operasional beserta hasil wawancara bersama pihak yang berkaitan dengan BUMDes, ditemukan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan masalah utama, melainkan berkaitan erat dengan pedoman pengelolaan internal BUMDes sendiri, khususnya di dalam aspek keuangan dan mekanisme pengawasan.

Di tingkat operasional, Unit Toko Desa ternyata masih mencatat seluruh transaksinya secara manual menggunakan buku kas sederhana sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Catatan tersebut kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada Direktur BUMDes sebagai bahan penyusunan laporan periodik ke pemerintah desa.



Gambar 1. Pencatatan transaksi manual pada Unit Toko Desa Pagerwangi

Meskipun laporan kas yang digunakan selama ini dinilai telah memadai untuk memenuhi kebutuhan administrasi dasar dan pelaporan kepada pemerintah desa, Kepala Desa mengonfirmasi bahwa format tersebut belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi aset, kewajiban, serta kinerja usaha BUMDes secara keseluruhan. Selain itu, belum adanya pedoman pencatatan dan pelaporan menyebabkan integrasi laporan antarunit

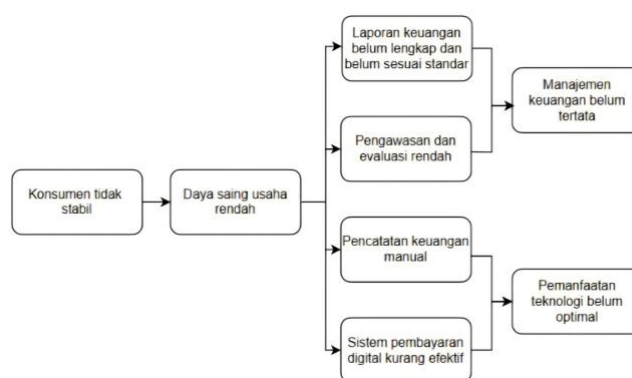
usaha belum berjalan optimal serta meningkatkan risiko inkonsistensi data.

Analisis akar masalah dilakukan menggunakan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) melalui pemetaan hubungan sebab-akibat (*cause mapping*). Hasil pemetaan yang disajikan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa permasalahan BUMDes bersumber dari dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu aspek manajemen keuangan dan aspek pemanfaatan teknologi.

Dari sisi manajemen keuangan, pedoman pelaporan BUMDes belum tersusun secara lengkap, yakni sebatas laporan laba rugi tanpa adanya laporan posisi keuangan maupun arus kas. Akibatnya, evaluasi kinerja usaha secara menyeluruh baik di level unit maupun BUMDes menjadi terbatas. Selain itu, belum adanya standar pelaporan yang baku serta lemahnya pengawasan internal membuat pelaporan antarunit belum berjalan secara konsisten.

Pada aspek pemanfaatan teknologi, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual sehingga integrasi data keuangan antarunit usaha belum optimal. Penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS juga belum dapat dimanfaatkan secara efektif karena sebelumnya masih terhubung dengan rekening pribadi pengelola sehingga menimbulkan risiko pencampuran dana usaha dan dana pribadi. Kondisi ini menghambat optimalisasi transaksi non-tunai dalam mendukung transparansi dan efisiensi pencatatan keuangan BUMDes.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, termasuk untuk keperluan administrasi kepada pemerintah desa dan instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan pengelola masih perlu melakukan penyesuaian data pada saat penyusunan laporan tertentu.



Gambar 2. Identifikasi akar masalah BUMDes menggunakan *Root Cause Analysis* (RCA) melalui *cause mapping*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pendamping merumuskan tiga rekomendasi utama

yang mencakup penyusunan standar prosedur operasional (SOP) pelaporan keuangan BUMDes secara terintegrasi, pengembangan pedoman format laporan keuangan yang lebih lengkap dan terstruktur, serta optimalisasi sistem pembayaran digital QRIS pada Unit Toko Desa sebagai titik awal digitalisasi transaksi BUMDes. Namun, rekomendasi penyusunan SOP belum dapat direalisasikan karena fungsi pengawasan dalam struktur organisasi BUMDes belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pelaporan keuangan BUMDes tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan format laporan, tetapi juga dengan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa adanya mekanisme pengendalian internal yang memadai, penerapan sistem pelaporan yang terstandar berpotensi tidak berjalan secara konsisten. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola BUMDes perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek administratif maupun kelembagaan. Pengendalian internal yang berjalan efektif merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga integritas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat desa (Fitrilia & Rini, 2025).

3.2 Optimalisasi Sistem Pembayaran Digital QRIS

Untuk meningkatkan transparansi transaksi usaha dan mendukung pencatatan arus kas harian yang lebih akurat, tim pendamping melakukan reaktivasi sistem pembayaran digital pada Unit Toko Desa sebagai unit operasional utama dengan membuat QRIS melalui aplikasi Dana Bisnis. Proses reaktivasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3. Dalam pelaksanaannya, tim pendamping juga memberikan edukasi tentang konsep pemisahan entitas usaha (*entity concept*) untuk mencegah tercampurnya dana pribadi dan dana usaha (*commingling of funds*), sekaligus menegaskan bahwa akun QRIS yang digunakan hanya boleh dipakai untuk transaksi operasional Unit Toko Desa. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan BUMDes secara keseluruhan.



Gambar 3. Reaktivasi sistem pembayaran digital QRIS pada Unit Toko Desa Pagerwangi

Untuk melihat dampak awal implementasi program, tim melakukan konfirmasi lanjutan kepada pengelola setelah reaktivasi QRIS. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital yang sebelumnya tidak digunakan telah mulai dimanfaatkan dalam operasional Unit Toko Desa dengan tercatat sebanyak tujuh transaksi menggunakan QRIS.

Meskipun jumlah transaksi tersebut masih relatif terbatas dan sebagian besar konsumen masih memilih pembayaran tunai, capaian ini menunjukkan bahwa hambatan utama penggunaan QRIS telah berhasil diatasi. Hasil ini menunjukkan bahwa optimalisasi transaksi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem pembayaran, tetapi juga pada tingkat penerimaan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran non-tunai (Aman dkk., 2023).

3.3 Penyusunan Pedoman Laporan Keuangan BUMDes

Selain optimalisasi transaksi digital, kegiatan pendampingan juga menghasilkan Pedoman Format Laporan Keuangan BUMDes Berkah Mandiri Wangi yang disesuaikan dengan karakteristik operasional BUMDes. Bentuk pedoman yang telah disusun ditampilkan pada Gambar 4. Pedoman ini disusun sebagai solusi terhadap keterbatasan sarana digital sekaligus untuk menyediakan acuan pelaporan yang lebih terstruktur dan mudah diterapkan oleh pengelola. Selain memuat format laporan yang siap digunakan, pedoman tersebut juga dilengkapi penjelasan klasifikasi akun, contoh transaksi, dan mekanisme perhitungan sederhana agar pengelola dapat memahami keterkaitan antar komponen laporan keuangan secara lebih menyeluruh.

Komponen utama yang dikembangkan dalam pedoman ini adalah daftar akun atau *Chart*

of Accounts (COA) yang berfungsi sebagai dasar pengelompokan seluruh transaksi pada level BUMDes. COA disusun dengan sistem kode numerik sederhana yang membagi akun ke dalam enam kategori, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Setiap akun disertai penjelasan fungsi dan contoh transaksi nyata dari kegiatan unit-unit usaha BUMDes. Struktur ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, meningkatkan ketepatan pengawasan, serta mendukung proses integrasi laporan keuangan BUMDes secara keseluruhan.

Penyusunan COA mempertimbangkan kondisi operasional yang ditemukan selama pendampingan. Akun piutang usaha dimasukkan untuk memantau transaksi yang belum dilunasi, sedangkan akun penyusutan aset tetap dan akumulasi penyusutan ditambahkan sebagai respons terhadap kondisi aset operasional yang belum dikelola secara memadai. Selain itu, akun saldo laba ditahan dan modal penyertaan desa disusun untuk membantu pengelola memantau perkembangan modal BUMDes secara lebih utuh.

Selanjutnya disusun format laporan laba rugi BUMDes yang memuat komponen pendapatan, harga pokok penjualan (HPP), dan beban operasional untuk menggambarkan kinerja seluruh unit usaha dalam satu periode. Pedoman tersebut juga dilengkapi penjelasan konsep dasar laba rugi serta contoh akun pendukung agar dapat digunakan secara mandiri oleh pengelola.

Selain laporan laba rugi, pedoman juga memuat format laporan posisi keuangan yang mengacu pada persamaan dasar akuntansi antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Format ini mencakup klasifikasi aset lancar, aset tetap, kewajiban usaha, serta komponen modal berupa modal penyertaan desa dan saldo laba ditahan sehingga pengelola dapat memahami kondisi keuangan BUMDes secara lebih transparan.

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
BUMDes Berkah Mandiri Wangi
Desa Pagerwangi

Dissusun sebagai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes dalam Kegiatan Pendampingan Mata Kuliah Proyek Konsultasi Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia

BAB I
PENYUSUNAN DAFTAR AKUN (CHART OF ACCOUNTS/COA)

1.1 Pengertian Daftar Akun
Daftar akun merupakan kumpulan akun yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi keuangan BUMDes. Penyusunan daftar akun bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, pengelompokan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian keuangan setiap unit usaha BUMDes.

1.2 Tujuan Penyusunan Daftar Akun

1. Mempermudah pencatatan transaksi keuangan
2. Mempermudah penyusunan laporan keuangan
3. Membantu pengelompokan transaksi berdasarkan jenis akun
4. Mempermudah pengawasan keuangan setiap unit usaha
5. Membantu penyusunan laporan kepada pemerintah desa

1.3 Klasifikasi Daftar Akun

A. Aset
Aset adalah harta atau sumber daya yang dimiliki BUMDes dan digunakan untuk menjalankan usaha.

Kode	Nama Akun	Keterangan
1-100	Kas	Uang tunai yang tersedia di toko atau dipegang pengelola. Contoh: • uang hasil penjualan harian toko • uang pembayaran sewa tempat • uang yang dipakai belanja stok
1-110	Bank	Uang BUMDes yang disimpan di

1/16

Gambar 4. Pedoman format laporan keuangan BUMDes Berkah Mandiri Wangi

Untuk melengkapi kebutuhan pelaporan, disusun pula format laporan arus kas yang mengelompokkan mutasi kas ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Format tersebut membantu pengelola mengidentifikasi sumber penerimaan dan pengeluaran kas serta memahami keterkaitannya dengan laporan posisi keuangan secara lebih terstruktur. Setelah pedoman selesai disusun, tim pendamping melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengurus BUMDes sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Sosialisasi pedoman laporan keuangan kepada pengurus BUMDes

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan berhasil mengidentifikasi akar permasalahan pengelolaan keuangan BUMDes Berkah Mandiri Wangi dan menghasilkan dua luaran utama, yaitu reaktivasi sistem pembayaran digital QRIS pada Unit Toko Desa serta penyusunan

Pedoman Format Laporan Keuangan BUMDes yang mencakup *Chart of Accounts* (COA), laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Temuan ini sejalan dengan Niar dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaporan yang belum optimal masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola BUMDes. Selain itu, laporan keuangan yang terstandar dapat mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel bagi pengelola maupun pemerintah desa (Andriani dkk., 2023). Kedua program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan BUMDes secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Program pendampingan pada BUMDes Berkah Mandiri Wangi Desa Pagerwangi menghasilkan dua luaran utama, yaitu tersusunnya Pedoman Format Laporan Keuangan yang mencakup *chart of accounts*, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, serta optimalisasi sistem pembayaran digital melalui QRIS bisnis pada Unit Toko Desa yang telah direaktivasi dengan pemisahan rekening usaha dari rekening pribadi pengurus. Kedua luaran tersebut memperkuat sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan pemahaman pengelola terhadap prinsip dasar akuntansi dan pemisahan keuangan usaha.

Meskipun demikian, program ini masih memiliki keterbatasan berupa durasi pendampingan yang relatif singkat, keterbatasan sarana perangkat digital, serta cakupan intervensi yang masih terbatas pada Unit Toko Desa. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa penyusunan SOP pelaporan keuangan terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi dasar, serta perluasan implementasi sistem digital ke seluruh unit usaha BUMDes.

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak lepas dari dukungan penuh serta sinergi positif dari berbagai pihak. Tim pendamping mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung jalannya kegiatan ini. Apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam juga diampaikan kepada dosen pembimbing atas segala arahan, bimbingan, dan masukan berharga

yang diberikan sepanjang proses pendampingan. Keberhasilan kegiatan ini juga terwujud berkat kolaborasi yang luar biasa dari mitra, yaitu pengurus BUMDes Berkah Mandiri Wangi Desa Pagerwangi, khususnya jajaran pengelola Toko Desa Pagerwangi. Tim pendamping sangat mengapresiasi keterbukaan, sambutan hangat, serta partisipasi aktif para pengurus selama proses reaktivasi sistem pembayaran digital menggunakan QRIS dan sesi sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan. Partisipasi dan antusiasme yang tinggi oleh mitra juga menjadi modal sosial yang sangat penting dalam membangun kemandirian serta akuntabilitas tata kelola usaha desa. Semoga kontribusi yang diberikan melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pemahaman finansial ini dapat memberikan dampak yang nyata, adaptif, serta berkelanjutan bagi kemajuan Toko Desa Pagerwangi dan pengembangan BUMDes di masa mendatang.

Daftar Referensi

- Adristi, T., Setiawan, N.Y., & Wijoyo, S.H. (2025). Evaluasi pelayanan publik di Kampung Kayutangan Heritage berdasarkan analisis sentimen dan root cause analysis (RCA). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(3), 1-9.
- Aman, I., Yuvita, Y., & Hafid, A. (2023). Efektivitas penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. *ECo-Buss*, 6(2), 870–881. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.1052>
- Andriani, R. N., Rahman, R., Kurniawan, K., & Firmansyah, I. (2023). Penyusunan laporan keuangan BUMDes berbasis aplikasi untuk mencapai akuntabilitas informasi akuntansi. *JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 2(2), 21–26.
- Ardan, M., Rahman, F. F., Nurhasanah, N., Patrizia, J., Caroline, A. N., & Rifqi, R. (2023). PKM Klinik Ramlah Parjib dalam meningkatkan kemandirian kesehatan melalui pelayanan SMARTER dan RCA patient safety. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2997–3004.
- Fitrilia, D.I., & Rini, D.D.O. (2025). Internal Control and Integrity in Preventing Village Financial Fraud: Pembangunan Bisnis Berkelanjutan untuk Usaha Desa. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(2), 1-14. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i2.1259>
- Hadi, P.A., Kurniawansih, H.T., & Barus, M.J. (2025). Pengaruh kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2), 252-263.
- Niar, U.S.I., Oktavendi, W.T., & Irawan, D. (2023). Analisis Tata Kelola Keuangan BUMDes

Berdasarkan Prinsip Corporate Governance di Kabupaten Magetan. *Jurnal Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(3), 1081–1091.

Nugroho, M.R. (2018). Penerapan pola sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam menggerakkan potensi desa di Kecamatan Saptosari. *Prosiding Sembadha*, 1, 28–37.

Putra, N. B., Rusliyawati, R., Damayanti, F., & Ardimansyah. (2024). Uncovering the meaning of accountability: Is the Village-Owned Enterprises (BUMDes) accountable? *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.17509/jpak.v12i1.62945>

Sakdiyah, S. H., Eltivia, N., & Afandi, A. (2022). Root cause analysis using fishbone diagram: Company management decision making. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 566–576. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.103>

Slamet, K., Kusuma, I.G.K.C.B.A., Cahyady, Y., Siski, D.O., Paramudea, I.R., & Mahendra, D.N. (2025). Pendampingan BUMDes Babo dalam Menyusun Laporan Keuangan Auditable dan Kepatuhan Perpajakan. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 7(1), 37–44. <https://doi.org/10.31092/kuat.v7i1.2783>